

STATISTIK PENDIDIKAN *PROVINSI SULAWESI SELATAN*

20 23

Volume 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

20 23

Volume 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023

Volume 9, 2024

Katalog : 4301002.73
Nomor Publikasi : 73000.24021
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii+77 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi: freepik.com

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

TIM PENYUSUN

**STATISTIK PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023
Volume 9, 2024**

Pengarah

Aryanto

Penanggungjawab

Papintana

Penyunting

Kusmiyati

Is Anjar Wulandari

Penulis Naskah

Ika Musvita

Indriani Burhanuddin

Penata Letak

Muh. Mustakim Hasma

Pengolah Data

Ika Musvita

Indriani Burhanuddin

KATA PENGANTAR

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Bidang pendidikan menjadi tujuan ke-4 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022—2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Publikasi ini menggambarkan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Susenas Maret 2023. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Informasi dasar yang disajikan diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan angka buta huruf.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Makassar, April 2024
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan



Aryanto

DAFTAR ISI

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023 Volume 9, 2024

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	6
1.3. Sumber Data	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
2. METODOLOGI	9
2.1. Ruang Lingkup	11
2.2. Kerangka Sampel	11
2.3. Rancangan Sampel	12
2.4. Metode Pengumpulan Data	13
2.5. Pengolahan Data	13
3. KONSEP DAN DEFINISI	15
4. PARTISIPASI SEKOLAH	21
4.1. Angka Partisipasi Sekolah	22
4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA	32
5. CAPAIAN PENDIDIKAN	37
5.1. Buta Huruf	38
5.2. Penduduk Yang Tidak Bersekolah Lagi	49
5.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	52

6. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	55
6.1 Jumlah Sekolah	56
6.2 Jumlah Guru	60
6.3 Jumlah Murid	63
6.4. Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar Dan Guru	67
7. PENUTUP	71
Kesimpulan	72
8. DAFTAR PUSTAKA	75
Daftar Pustaka	77

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PARTISIPASI ANAK USIA 0-6 TAHUN YANG SEDANG/PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRASEKOLAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2022 DAN 2023	255
TABEL 2 PARTISIPASI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG SEDANG/PERNAH SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN, PARITAS GENDER, DAN INDEKS PARITAS GENDER, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2022 DAN 2023	255
TABEL 3 PARTISIPASI ANAK USIA 0-6 TAHUN YANG SEDANG/PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRASEKOLAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2022 DAN 2023	266
TABEL 4 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT KABUPATEN/KOTA, KELOMPOK UMUR, DAN JENIS KELAMIN, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023	2929
TABEL 5 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT KABUPATEN/KOTA, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN JENIS KELAMIN, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023.....	344
TABEL 6 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KABUPATEN/KOTA, JENIS KELAMIN, DAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2022 DAN 2023	433
TABEL 7 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BUTA HURUF MENURUT KABUPATEN/KOTA, JENIS KELAMIN, DAN KELOMPOK UMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023.....	477
TABEL 8 PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-18 TAHUN MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN JENIS KELAMIN, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023	49
TABEL 9 PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-18 TAHUN MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH, KLASIFIKASI DAERAH, DAN JENIS KELAMIN, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023	500
TABEL 10 JUMLAH SEKOLAH MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN STATUS SEKOLAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2022/2023	58
TABEL 11 JUMLAH GURU MENURUT KABUPATEN/KOTA, JENJANG PENDIDIKAN, DAN JENIS KELAMIN, PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2022/2023	611
TABEL 12 JUMLAH MURID MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN JENJANG PENDIDIKAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2022/2023	644

TABEL 13 JUMLAH DAN RASIO MURID DAN ROMBONGAN BELAJAR MENURUT JENJANG
PENDIDIKAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2022/2023..... 677

TABEL 14 JUMLAH DAN RASIO MURID DAN GURU MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2022/2023..... 68

<https://sulsel.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) USIA 7-18 TAHUN MENURUT JENIS KELAMIN, PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2022/2023.....	27
GAMBAR 2 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEMAMPUAN BACA TULIS DAN JENIS KELAMIN, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023	42
GAMBAR 3 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023	45
GAMBAR 4 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT.....	52

1

PENDAHULUAN

<https://sulsel.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (civilized). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan

nasional. Selanjutnya, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatril dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yakni SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yakni SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan, kegiatan pendidikan

informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin, 1996:24). Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Di samping sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait.

Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi. Terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antarpenduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kultur sosial dan budaya yang berbeda antardaerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun bagi penduduk perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah daerah Sulawesi Selatan, dengan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan, pemerintah perlu mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Sulawesi Selatan bersaing dalam tataran global.

Beberapa indikator pendidikan disajikan dalam publikasi “Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2023” sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan di bidang pendidikan. Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Selain itu, digunakan data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2019/2023.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk/angka melek huruf), tingkat partisipasi sekolah yang meliputi angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi kasar (APK), serta tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan siswa menurut jenjang pendidikan dan partisipasi sekolah anak usia prasekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya Program Wajib Belajar 12 Tahun dan penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM).

1.2 Tujuan

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menyediakan data dasar pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan; dan

3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

1.3. Sumber Data

Data dan informasi pendidikan bersumber dari Susenas Kor Maret 2023. Susenas merupakan survei semseteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Sampel Susenas Provinsi Sulawesi Selatan tersebar di 24 kabupaten/kota yang mencakup 15.298 rumah tangga baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Selain itu, data sekunder mengenai pendidikan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2019/2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2023 tersusun atas tujuh bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika;

- BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.
- BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.
- BAB IV. PARTISIPASI SEKOLAH, meliputi Partisipasi Siswa pada Pendidikan Prasekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

- BAB V. CAPAIAN PENDIDIKAN, meliputi Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.
- BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, meliputi Jumlah Sekolah, Jumlah Pendidik, Jumlah Siswa, dan Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru.
- BAB VII. PENUTUP, meliputi Kesimpulan.



2

METODOLOGI

<https://sulsel.bps.go.id>

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. Ruang Lingkup

Susenas Maret 2023 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus¹ khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di dalam blok sensus biasa. Jumlah sampel Susenas Maret 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15.300 rumah tangga, tersebar dalam 1.530 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel tersebut dicacah dengan kuesioner VSEN20.K dan VSEN20.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

2.2. Kerangka Sampel

Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan Susenas, Sakernas, dan Supas 2015 adalah sekitar 288.000 blok sensus (40 persen

¹ Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

populasi) yang ditarik secara probability proportional to size (PPS)² dengan ukuran jumlah rumah tangga Sp2010 dari master frame blok sensus. Selanjutnya untuk kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2020.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 40 persen blok sensus SP2020 yang sudah ada kode stratanya. Sebanyak 40 persen blok sensus tersebut disebut sampling frame induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

2.3. Rancangan Sampel

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Sampel rumah tangga untuk estimasi kabupaten/kota dipilih dengan metode two stage one phase stratified sampling dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Memilih 40 persen blok sensus populasi secara PPS dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.

Tahap 2: Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara systematic³ di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.

Tahap 3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara systematic sampling dengan implicit stratification menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT).

² *Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu desain pengambilan sampel, dimana probabilitas setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilitas terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar.

³ *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pendidikan terakhir.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilaksanakan pada Maret 2023. Sampel total Susenas Maret 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15.300 rumah tangga. Pengumpulan data dari rumah tangga sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden oleh petugas pencacah. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5. Pengolahan Data

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antarisian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dan jawaban lainnya. Proses perekaman data dilakukan di BPS kabupaten/kota.

3

KONSEP DAN DEFINISI

<https://sulsel.bps.go.id>

Pembatasan kerangka berpikir dibuat untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Contoh satuan pendidikan prasekolah **pada jalur pendidikan formal** adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Contoh satuan pendidikan prasekolah **pada jalur pendidikan nonformal** adalah PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

2. **Mengikuti pendidikan prasekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah.
3. **Dapat membaca dan menulis** artinya jika seseorang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a – z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh: huruf jawa, kanji, dll). **Kalimat sederhana** adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Seorang tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan ke dalam kategori

dapat membaca dan menulis. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaiknnya tidak digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis.

4. **Bersekolah** adalah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal.
5. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
 - a. **Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).
 - b. **Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemendikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 - c. **Jenjang pendidikan tinggi** merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi:
 - **Pendidikan akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.

- **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
 - **Pendidikan Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.
6. **Jenjang pendidikan nonformal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26).

7. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
8. **Masih bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
9. **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
10. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
11. **Angka partisipasi sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.
12. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.
13. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

4

PARTISIPASI SEKOLAH

<https://sulsel.bps.go.id>

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan ke dalam APS.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

4.1.1. Partisipasi Siswa pada PAUD

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syaraf motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan, akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak pada masa mendatang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana cara bermain

yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. (Hilary Clinton, 1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2023 menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 17,71 persen. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 anak usia 5-6 tahun, terdapat lebih dari 18 orang yang sudah mengikuti pendidikan formal. Ini berarti belum optimalnya program pemerintah yang menerapkan aturan bahwa batas minimum umur anak untuk mengikuti sekolah formal SD adalah 7 tahun. Berbeda halnya dengan partisipasi prasekolah untuk anak usia 0-6 tahun, yakni mencapai 23,48 persen, mengalami penurunan dari tahun lalu.

Dilihat dari Paritas Gender (PG) yang merupakan selisih antara penduduk laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa nilai PG partisipasi anak usia 5-6 tahun di Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar 2,88 persen. Ini menandakan persentase anak perempuan umur 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki pada usia yang sama. Indikator kesenjangan lainnya adalah Indeks Paritas Gender (IPG) yang merupakan perbandingan capaian penduduk perempuan terhadap laki-laki. Pada tahun 2023, IPG Sulawesi Selatan menunjukkan nilai 0,85 persen yang berarti angka kesetaraan gender di Sulawesi Selatan berada sudah di atas ambang batas kesenjangan gender, yaitu persentase perempuan yang sekolah pada usia 5-6 tahun lebih banyak dibandingkan persentase laki-laki.

Tabel 1 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan 2023

Karakteristik	Partisipasi Sekolah	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	24,18	23,75
Perempuan	22,78	23,19
Tipe Daerah		
Perkotaan	24,18	23,14
Perdesaan	22,78	23,77
Total	23,74	23,48

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan 2023

Tabel 2 Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun yang Sedang/Pernah Sekolah menurut Jenis Kelamin, Paritas Gender, dan Indeks Paritas Gender, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan 2023

Tahun	Partisipasi Sekolah			Paritas Gender	Indeks Paritas Gender
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022	21,69	21,63	21,66	0,07	0,99
2023	19,11	16,23	17,71	2,88	0,85

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan 2023

Tabel 3 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan 2023

Kabupaten	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	33,30	34,26	39,08	28,14	33,99
02. Bulukumba	30,77	27,10	26,11	30,64	28,32
03. Bantaeng	31,32	28,76	26,87	32,51	29,73
04. Jeneponto	14,10	24,15	21,72	22,12	21,92
05. Takalar	29,81	28,05	30,08	27,26	28,69
06. Gowa	25,99	17,23	17,21	25,87	21,44
07. Sinjai	33,35	37,49	40,78	30,93	36,07
08. Maros	13,39	22,97	21,35	16,65	19,01
09. Pangkep	31,35	24,82	29,31	24,84	27,09
10. Barru	23,17	32,52	29,42	28,16	28,79
11. Bone	32,78	15,40	20,69	20,82	20,76
12. Soppeng	52,58	20,28	35,21	25,87	30,73
13. Wajo	29,15	32,20	32,27	29,78	31,10
14. Sidrap	27,08	34,63	35,69	27,03	31,71
15. Pinrang	19,81	22,19	22,66	19,94	21,35
16. Enrekang	23,47	25,07	27,73	21,42	24,69
17. Luwu	9,02	18,36	14,60	18,12	16,37
18. Tana Toraja	33,44	20,29	25,40	21,49	23,57
22. Luwu Utara	25,00	25,60	27,62	23,34	25,47
25. Luwu Timur	28,28	20,88	22,09	24,34	23,20
26. Toraja Utara	30,32	20,83	20,17	27,11	23,82
71. Makassar	17,76	31,32	17,93	17,65	17,79
72. Parepare	20,30	13,24	20,91	19,28	20,12
73. Palopo	22,06	25,04	21,45	23,41	22,38
Sulawesi Selatan	23,14	23,77	23,75	23,19	23,48

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan Susenas Maret 2023

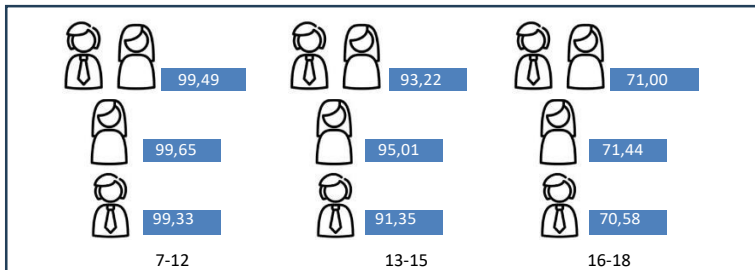
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP DAN SMA

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$APS\ SD = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS\ SMP = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS\ SMA = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7–18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022–2023

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2023 dan menggunakan formulasi diatas dapat disajikan pada **Gambar 1**. Pada Gambar tersebut terlihat bahwa APS SD sebesar 99,49 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada jenjang pendidikan SMP (13-15 tahun) baru mencapai 93,22 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA (16-18 tahun), angka APS baru mencapai 71,00 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan yang mana hal tersebut menggambarkan bahwa kesetaraan gender dalam hal pendidikan sudah tercapai.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, **Tabel 4** di bawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terjadi di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

A. APS Usia 7-12 Tahun

Secara umum, angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-12 tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. APS SD Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 99,43 dan tahun 2023 sebesar 99,49 persen. Jika dilihat lebih rinci menurut kabupaten/kota, APS usia 7-12 tahun seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai lebih dari 98 persen. Tingginya angka APS di Sulawesi Selatan ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup berhasil.

Tabel 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Kabupaten/Kota	APS 7-12			APS 13-15		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	97,74	98,85	98,32	96,01	87,52	91,83
02. Bulukumba	99,94	100,00	99,97	93,98	91,44	92,80
03. Bantaeng	99,82	100,00	99,91	91,89	98,23	94,92
04. Jeneponto	99,71	99,95	99,83	78,44	97,71	88,69
05. Takalar	98,49	99,96	99,32	88,94	90,71	89,79
06. Gowa	100,0	98,57	99,29	97,55	95,65	96,58
07. Sinjai	99,59	98,56	99,09	93,62	91,66	92,49
08. Maros	100,0	98,99	99,49	92,32	98,82	95,24
09. Pangkep	98,82	99,25	99,03	93,74	89,83	91,75
10. Barru	100,0	99,89	99,95	94,95	92,87	94,01
11. Bone	98,70	100,00	99,28	86,59	97,32	92,36
12. Soppeng	99,30	100,00	99,64	87,07	97,29	92,10
13. Wajo	100,0	98,69	99,34	85,74	84,41	85,07
14. Sidrap	99,97	99,97	99,97	90,91	90,93	90,92
15. Pinrang	99,28	100,00	99,63	87,99	95,14	91,78
16. Enrekang	100,0	99,86	99,93	95,12	97,87	96,49
17. Luwu	99,10	100,00	99,53	97,17	89,85	93,50
18. Tana Toraja	98,81	100,00	99,38	95,64	96,73	96,28
22. Luwu Utara	100,0	99,78	99,89	93,25	92,52	92,86
25. Luwu Timur	99,98	100,00	99,99	93,57	98,99	96,21
26. Toraja Utara	98,90	100,00	99,41	99,03	94,77	97,02
71. Makassar	98,71	100,00	99,34	88,04	99,58	93,88
72. Parepare	99,54	100,00	99,77	91,44	94,28	92,92
73. Palopo	98,96	99,02	98,99	96,41	96,93	96,69
Sulawesi Selatan	99,33	99,65	99,49	91,35	95,01	93,22
2022	99,31	99,57	99,43	91,57	94,94	93,20

Lanjutan Tabel 4

Kabupaten/Kota	APS 16-18		
(1)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	65,97	64,45	65,24
02. Bulukumba	69,84	79,49	74,53
03. Bantaeng	58,90	54,65	56,90
04. Jeneponto	67,85	74,33	70,64
05. Takalar	63,80	68,05	65,51
06. Gowa	74,08	63,18	68,96
07. Sinjai	73,75	68,58	71,63
08. Maros	69,26	69,42	69,34
09. Pangkep	70,22	63,63	66,73
10. Barru	65,75	76,83	71,40
11. Bone	63,86	79,86	71,43
12. Soppeng	76,50	79,10	77,86
13. Wajo	68,23	58,23	63,02
14. Sidrap	71,03	65,85	68,87
15. Pinrang	77,70	69,86	73,75
16. Enrekang	76,50	82,59	79,24
17. Luwu	70,12	71,04	70,57
18. Tana Toraja	77,90	76,29	77,20
22. Luwu Utara	64,96	77,29	70,56
25. Luwu Timur	72,64	68,17	70,30
26. Toraja Utara	73,13	79,97	76,45
71. Makassar	70,78	71,52	71,19
72. Parepare	71,67	71,39	71,53
73. Palopo	81,22	87,93	84,45
Sulawesi Selatan	70,58	71,44	71,00
2022	70,36	71,26	70,81

Catatan:

L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

B. APS Usia 13-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun capaiannya tidak secemerlang APS SMP meskipun mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. APS Sulawesi Selatan tahun 2023 masih berada di angka 93,22 persen. APS Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 93,20. Pada tahun 2023 pada umumnya APS kabupaten/kota mencapai lebih dari 90 persen. Namun terdapat kabupaten yang APS-nya kurang dari 90 persen yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo. Pencapaian APS ini tentu tidak terlepas dari program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dilihat dari sisi gender, APS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua dari sisi pendidikan hampir setara antara laki-laki maupun perempuan.

C. APS USIA 16-18 TAHUN

Seiring dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, APS usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. APS SMA Sulawesi Selatan tahun 2023 mencapai 71,00 persen. Meskipun perhatian pemerintah daerah sudah cukup serius pada bidang pendidikan, namun pada kelompok umur ini, APS yang dicapai kabupaten/kota masih berada di kisaran 56 hingga 84 persen. Kabupaten Bantaeng mempunyai angka APS SMA yang terendah yaitu 56,90 persen. Rendahnya APS usia 16-18 tahun Sulawesi Selatan mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan pada tahun-tahun yang akan datang. Dilihat dari sisi gender, dari tahun ke tahun APS usia 16-18 tahun untuk perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki.

4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA

Selain APS dan APK, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut:

APM SD

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang masih sekolah SD usia 7 – 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

APM SMP

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang masih sekolah SMP usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

APM SMA

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang masih sekolah SMA usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan di seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti terus

bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan di seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti terus bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Kabupaten/Kota	APM SD			L	APM SMP	
	L	P	L + P		P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	97,74	98,8	98,32	82,83	71,09	77,05
02. Bulukumba	99,94	100,0	99,97	82,87	80,77	81,90
03. Bantaeng	99,82	100,0	99,91	81,43	74,67	78,20
04. Jeneponto	96,41	94,4	95,42	60,84	75,51	68,65
05. Takalar	98,49	98,73	98,62	68,68	60,68	64,86
06. Gowa	100,00	98,57	99,29	81,86	75,96	78,83
07. Sinjai	99,59	98,56	99,09	83,11	78,98	80,73
08. Maros	100,00	98,99	99,49	73,82	82,13	77,56
09. Pangkep	95,27	94,72	95,01	77,47	73,92	75,66
10. Barru	98,60	99,89	99,24	83,14	82,96	83,06
11. Bone	95,67	96,26	95,94	70,23	88,28	79,94
12. Soppeng	99,30	98,21	98,76	81,93	77,86	79,92
13. Wajo	99,60	98,65	99,12	60,21	70,04	65,17
14. Sidrap	98,70	97,92	98,33	82,98	78,71	80,51
15. Pinrang	99,28	99,78	99,52	75,44	73,76	74,55
16. Enrekang	99,07	99,4	99,26	88,44	76,00	82,22
17. Luwu	99,00	96,60	97,85	88,11	64,51	76,29
18. Tana Toraja	98,81	100,0	99,38	88,60	78,03	82,44
22. Luwu Utara	92,90	96,81	94,80	76,02	73,03	74,42
25. Luwu Timur	99,98	99,07	99,55	80,46	82,63	81,51
26. Toraja Utara	98,90	98,66	98,79	82,20	79,45	80,90
71. Makassar	98,71	100,0	99,34	79,19	85,30	82,28
72. Parepare	99,09	100,	99,55	74,55	74,59	74,57
73. Palopo	97,73	98,92	98,34	77,22	80,74	79,06
Sulawesi Selatan	98,36	98,45	98,41	77,86	78,09	77,98
2022	98,64	98,18	98,41	77,07	77,79	77,42

Lanjutan Tabel 5

Kabupaten/Kota	APM SMA		
	L	P	L + P
(1)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	32,60	51,20	41,49
02. Bulukumba	54,69	58,76	56,67
03. Bantaeng	49,18	31,62	40,90
04. Jeneponto	54,34	59,10	56,39
05. Takalar	63,80	61,10	62,71
06. Gowa	69,52	55,79	63,07
07. Sinjai	69,56	63,50	67,08
08. Maros	57,23	66,11	61,55
09. Pangkep	66,36	59,71	62,84
10. Barru	62,75	51,25	56,88
11. Bone	45,77	73,32	58,80
12. Soppeng	67,29	67,04	67,16
13. Wajo	62,46	46,19	53,98
14. Sidrap	68,03	60,77	65,00
15. Pinrang	63,73	69,11	66,45
16. Enrekang	57,59	77,48	66,55
17. Luwu	63,30	58,67	61,05
18. Tana Toraja	39,76	66,88	51,52
22. Luwu Utara	63,90	70,67	66,97
25. Luwu Timur	63,30	62,97	63,13
26. Toraja Utara	58,08	63,74	60,83
71. Makassar	60,87	56,07	58,22
72. Parepare	64,20	68,90	66,42
73. Palopo	74,49	86,21	80,13
Sulawesi Selatan	60,27	60,88	60,57
2022	60,54	60,34	60,44

Catatan:

L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

A. APM SD

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2023, APM SD di Sulawesi Selatan mencapai 98,41 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022. Pada **Tabel 5** terlihat jelas perbedaan angka APM Sulawesi Selatan dari tahun 2022 antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan waktu, perbedaan APM SD antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di SD.

B. APM SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 77,42 persen di tahun 2022 menjadi 77,98 di tahun 2023. Peningkatan APM SMP ini terjadi setengah dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP tidak menunjukkan perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan. Artinya, kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

C. APM SMA

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP, pada tahun 2023 APM SMA Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 APM SMA mencapai 60,44 persen, meningkat menjadi 60,57 persen pada 2023. Meskipun APM SMA terendah dibandingkan APM kelompok lainnya, namun peningkatan APM SMA ini dapat menggambarkan peningkatan pencapaian program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

5

CAPAIAN PENDIDIKAN

<https://sulsel.bps.go.id>

5.1 Buta Huruf

Buta huruf adalah kondisi seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya seperti huruf jawa, kanji, dll. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka Buta Huruf (ABH) penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong buta huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan angka tersebut adalah sebagai:

1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih buta huruf;
2. Tolak ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; dan
3. Alat untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran (Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No 1 Tahun 2019).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Salah satu target dalam Tujuan 4, yakni Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Salah satu indikator dalam Tujuan 4 adalah 4.6.1.(a) persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas. Indikator tersebut merupakan indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Dalam Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target sebesar 95 persen pada 2023 dan sebesar 94,53 persen pada 2022 untuk indikator TPB tersebut. Sebagai bagian dari dunia global, Sulawesi Selatan juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Dalam Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial disebutkan bahwa AMK merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator tersebut kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. AMH dan ABH merupakan indikator yang nilainya saling berbanding terbalik. Semakin tinggi AMH suatu wilayah berarti ABH akan semakin rendah.

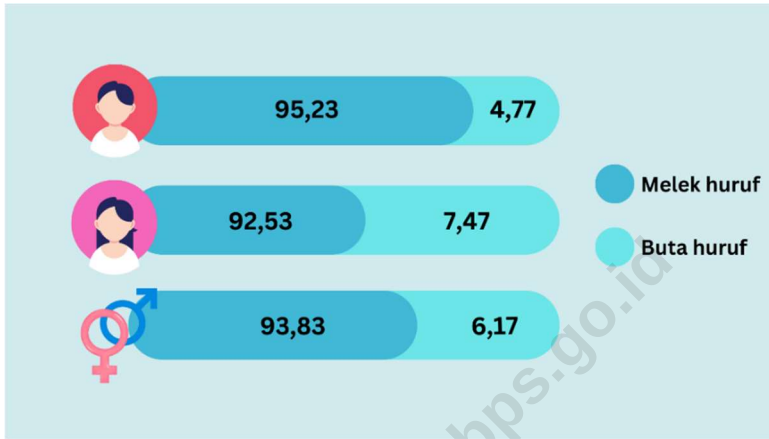
Pada 2022 tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 93,31 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban

untuk menuntaskan buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 1,69 persen agar target pada 2023 terpenuhi. Budaya literasi harus ditingkatkan karena merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, paket C, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Pada 2022, terdapat sebanyak 6,17 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan yang masih buta huruf. Pada **Gambar 2** tersaji potret kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada 2023, persentase penduduk perempuan yang buta huruf masih lebih banyak daripada persentase penduduk laki-laki yang buta huruf. Padahal, persentase penduduk laki-laki yang buta huruf mengalami penurunan dari tahun 2022 lalu dan persentase penduduk perempuan yang buta huruf juga mengalami penurunan. Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 7,47 persen. Sedangkan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 4,77 persen. Keadaan tersebut perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Sulawesi Selatan. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta huruf harus lebih ditingkatkan.

CAPAIAN PENDIDIKAN



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Tabel 6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan 2023

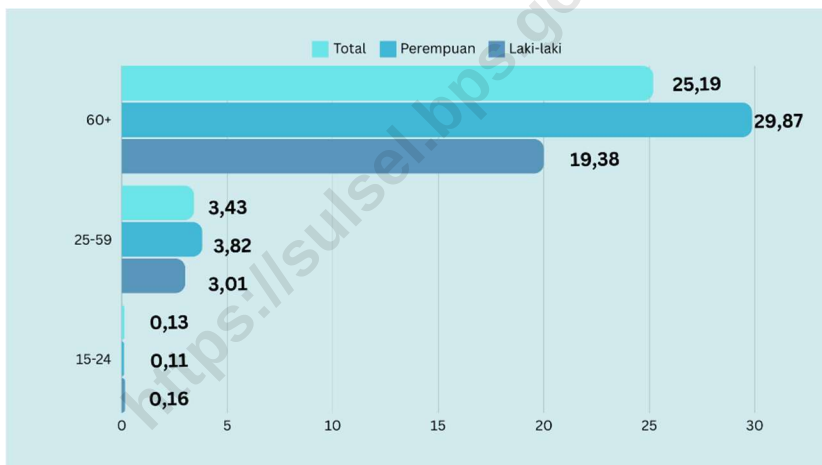
Kabupaten/Kota	Angka Buta Huruf					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	5,35	3,91	8,40	8,90	6,92	6,53
02. Bulukumba	6,28	6,48	7,07	10,42	6,69	8,58
03. Bantaeng	11,76	12,15	15,50	14,45	13,66	13,35
04. Jeneponto	17,71	15,71	20,61	16,80	19,19	16,28
05. Takalar	9,51	7,49	13,95	12,76	11,80	10,26
06. Gowa	7,32	6,72	10,58	9,16	8,98	7,98
07. Sinjai	10,31	9,27	10,46	9,34	10,38	9,31
08. Maros	7,94	4,84	12,73	10,34	10,35	7,68
09. Pangkep	2,96	2,80	5,38	5,88	4,21	4,41
10. Barru	9,25	6,60	12,31	6,80	10,83	6,71
11. Bone	7,14	6,16	8,17	9,15	7,68	7,75
12. Soppeng	6,80	4,36	9,09	7,06	8,01	5,81
13. Wajo	5,95	6,94	10,10	11,45	8,12	9,33
14. Sidrap	6,85	4,12	7,50	6,74	7,18	5,48
15. Pinrang	3,44	2,46	6,82	6,61	5,18	4,62
16. Enrekang	4,76	4,98	7,30	8,77	6,01	6,87
17. Luwu	2,83	2,98	4,59	4,30	3,71	3,65
18. Tana Toraja	6,06	4,81	8,02	10,57	7,00	7,66
22. Luwu Utara	2,27	2,03	4,97	5,21	3,61	3,62
25. Luwu Timur	7,13	3,92	7,46	6,23	7,29	5,04
26. Toraja Utara	5,85	6,53	8,10	7,99	6,95	7,26
71. Makassar	0,64	0,30	1,02	1,38	0,83	0,85
72. Pare Pare	1,01	1,82	2,13	3,33	1,58	2,60
73. Palopo	2,87	0,61	2,00	2,00	2,43	1,33
Sulawesi Selatan	5,68	4,77	7,65	7,47	6,69	6,17

Lanjutan Tabel 6

Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	94,65	96,09	91,60	91,10	93,08	93,47
02. Bulukumba	93,72	93,52	92,93	89,58	93,31	91,42
03. Bantaeng	88,24	87,85	84,50	85,55	86,34	86,65
04. Jeneponto	82,29	84,29	79,39	83,20	80,81	83,72
05. Takalar	90,49	92,51	86,05	87,24	88,20	89,74
06. Gowa	92,68	93,28	89,42	90,84	91,02	92,02
07. Sinjai	89,69	90,73	89,54	90,66	89,62	90,69
08. Maros	92,06	95,16	87,27	89,66	89,65	92,32
09. Pangkep	97,04	97,20	94,62	94,12	95,79	95,59
10. Barru	90,75	93,40	87,69	93,20	89,17	93,29
11. Bone	92,86	93,84	91,83	90,85	92,32	92,25
12. Soppeng	93,20	95,64	90,91	92,94	91,99	94,19
13. Wajo	94,05	93,06	89,90	88,55	91,88	90,67
14. Sidrap	93,15	95,88	92,50	93,26	92,82	94,52
15. Pinrang	96,56	97,54	93,18	93,39	94,82	95,38
16. Enrekang	95,24	95,02	92,70	91,23	93,99	93,13
17. Luwu	97,17	97,02	95,41	95,70	96,29	96,35
18. Tana Toraja	93,94	95,19	91,98	89,43	93,00	92,34
22. Luwu Utara	97,73	97,97	95,03	94,79	96,39	96,38
25. Luwu Timur	92,87	96,08	92,54	93,77	92,71	94,96
26. Toraja Utara	94,15	93,47	91,90	92,01	93,05	92,74
71. Makassar	99,36	99,70	98,98	98,62	99,17	99,15
72. Pare Pare	98,99	98,18	97,87	96,67	98,42	97,40
73. Palopo	97,13	99,39	98,00	98,00	97,57	98,67
Sulawesi Selatan	94,32	95,23	92,35	92,53	93,31	93,83

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan Susenas Maret 2023

Di **Tabel 6** menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis (melek huruf dan buta huruf). Tiga kabupaten yang mempunyai persentase penduduk yang buta huruf paling besar, yakni Kabupaten Jeneponto (16,28 persen), Bantaeng (13,35 persen) dan Takalar (10,26 persen). Sementara kabupaten/kota dengan persentase penduduk buta huruf paling rendah berturut-turut adalah Kota Makassar (0,85 persen) dan Kota Palopo (1,33 persen).



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Angka buta huruf menurut kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah.

Gambar 3 menyajikan angka buta huruf menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas) di Sulawesi Selatan tahun 2023.

Gambar 3 menunjukkan bahwa sebaran penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf sebagian besar berada pada kelompok lansia (60 tahun ke atas). Secara total (penduduk laki-laki dan penduduk perempuan), penduduk lansia yang buta huruf/buta aksara sebanyak 25,19 persen. Selanjutnya, penduduk dewasa yang buta aksara sebanyak 3,43 persen dan penduduk remaja yang buta aksara sebanyak 0,13 persen. Secara total, penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf cenderung menurun setiap tahunnya meskipun dilihat menurut kelompok umur.

Penduduk perempuan yang buta huruf baik kelompok lansia maupun kelompok dewasa masih lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang buta huruf. Meskipun demikian, remaja perempuan yang buta huruf pada 2023 lebih rendah dibandingkan remaja laki-laki. Hal tersebut dapat disebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran remaja perempuan akan pentingnya pendidikan. Penduduk laki-laki yang buta huruf untuk semua kelompok umur mengalami penurunan pada 2023. Penurunan yang tinggi terjadi pada lansia laki-laki, yakni semula 22,13 persen (2022) menjadi 19,38 persen (2023).

Selanjutnya, pada **Tabel 7** disajikan penduduk buta huruf menurut kelompok umur yang dirinci hingga level kabupaten/kota. Jika dilihat menurut jenis kelamin dan atau secara total, persentase penduduk remaja yang buta huruf di sebagian besar kabupaten/kota sudah mencapai 0,10 persen. Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Kabupaten Pinrang karena angka buta huruf remaja perempuannya mencapai 1,36 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Tabel 7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan		
	15-24	25-59	60+	15-24	25-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	–	3,40	9,66	–	5,42	27,43
02. Bulukumba	0,32	4,79	20,33	–	6,64	33,21
03. Bantaeng	–	9,01	45,42	0,26	8,60	56,37
04. Jeneponto	0,35	13,99	45,02	–	11,18	56,03
05. Takalar	–	5,74	27,22	–	7,48	45,47
06. Gowa	–	3,45	33,33	–	5,21	36,75
07. Sinjai	0,57	5,12	36,20	–	3,07	38,04
08. Maros	0,15	2,45	24,76	–	5,96	42,56
09. Pangkep	0,40	1,12	15,19	–	1,55	30,97
10. Barru	–	3,61	23,56	0,64	2,09	25,96
11. Bone	–	3,55	21,76	0,27	5,12	27,83
12. Soppeng	0,20	1,81	14,21	–	1,53	24,92
13. Wajo	–	5,61	20,50	–	5,85	40,17
14. Sidrap	–	2,22	16,20	0,45	2,40	26,69
15. Pinrang	–	0,39	13,49	1,36	3,04	23,46
16. Enrekang	0,39	1,88	20,61	–	4,09	29,81
17. Luwu	–	0,86	16,36	–	2,15	17,71
18. Tana Toraja	–	2,92	16,08	0,32	4,64	35,89
22. Luwu Utara	0,87	0,61	9,75	0,05	1,61	26,39
25. Luwu Timur	–	2,64	17,71	–	3,53	32,25
26. Toraja Utara	–	4,17	20,54	–	3,15	29,80
71. Makassar	0,25	0,33	0,24	–	0,37	9,95
72. Pare Pare	–	0,34	13,55	–	1,91	14,56
73. Palopo	–	0,50	2,76	–	0,46	13,76
Sulawesi Selatan	0,16	3,01	19,38	0,11	3,82	29,87

Lanjutan Tabel 7

Kabupaten/Kota (1)	Laki-Laki+Perempuan		
	15-24 (8)	25-59 (9)	60+ (10)
01. Kep. Selayar	–	4,46	19,48
02. Bulukumba	0,16	5,77	27,59
03. Bantaeng	0,13	8,80	51,54
04. Jeneponto	0,18	12,52	51,16
05. Takalar	–	6,65	37,86
06. Gowa	–	4,35	35,23
07. Sinjai	0,29	4,07	37,23
08. Maros	0,07	4,26	34,65
09. Pangkep	0,21	1,35	24,19
10. Barru	0,32	2,81	24,90
11. Bone	0,14	4,38	25,23
12. Soppeng	0,10	1,66	20,19
13. Wajo	–	5,73	31,72
14. Sidrap	0,22	2,31	22,02
15. Pinrang	0,68	1,76	19,04
16. Enrekang	0,21	2,98	25,51
17. Luwu	–	1,53	17,09
18. Tana Toraja	0,15	3,76	26,53
22. Luwu Utara	0,46	1,11	18,25
25. Luwu Timur	–	3,08	24,71
26. Toraja Utara	–	3,67	25,20
71. Makassar	0,12	0,35	5,68
72. Pare Pare	–	1,14	14,12
73. Palopo	–	0,48	8,94
Sulawesi Selatan	0,13	3,43	25,19

5.2. Penduduk Yang Tidak Bersekolah Lagi

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Selain itu, dengan melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024. Harapannya tidak ada anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

Tabel 8 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum pernah	0,82	0,41	0,62
2. Masih sekolah	90,12	91,44	90,77
3. Tidak bersekolah lagi	9,06	8,15	8,61

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Dari **Tabel 8** terlihat pada 2023 anak usia 7-18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah sudah mencapai 90,77 persen. Hal tersebut berarti sekitar 9 persen sisanya sedang tidak duduk di bangku sekolah. Jika dirinci menurut partisipasi sekolah, terdapat sebanyak 0,62 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan terdapat sebanyak 8,61 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi (anak tidak sekolah/ATS). Seperti yang dijelaskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2022-2024, ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan

sosial, ekonomi, budaya, geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Jika ditinjau dari jenis kelamin, pada 2023, anak perempuan usia 7-18 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi dari anak laki-laki, yakni mencapai 91,44 persen. Hal itu berarti, pada 2023, ATS laki-laki lebih tinggi dari ATS perempuan, yakni hampir mencapai angka 1 persen.

Tabel 9 menyajikan gambaran partisipasi sekolah penduduk 7-18 tahun yang dirinci menurut klasifikasi daerah. Secara total (laki- laki dan perempuan), persentasi anak usia 7-18 tahun di perdesaan yang tidak sekolah lebih tinggi dibandingkan anak usia 7-18 tahun di perkotaan, yakni berturut-turut sebesar 8,55 persen dan 9,89 persen. Hal tersebut menunjukkan masih ada ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Di daerah perdesaan, persentase anak laki-laki usia 7-18 tahun yang tidak sekolah lebih tinggi jika dibandingkan anak perempuan, yakni berturut-turut sebesar 10,22 persen dan 8,51 persen. Selisih persentase keduanya sudah melebihi 2 persen sehingga perlu dijadikan perhatian. Sebaliknya, di perkotaan, persentase anak perempuan usia 7-18 tahun yang tidak sekolah lebih tinggi dari anak laki-laki meskipun ketimpangannya tidak signifikan seperti di perdesaan.

Tabel 9 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, Klasifikasi Daerah, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Partisipasi Sekolah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tidak/belum pernah	1,01	0,38	0,69	0,65	0,45	0,55
2. Masih sekolah	91,27	91,88	91,58	89,13	91,05	90,07
3. Tidak bersekolah lagi	7,72	7,75	7,73	10,22	8,51	9,38
4. Jumlah 1 dan 3	8,73	8,12	8,42	10,87	8,95	9,93

Lanjutan Tabel 9

Partisipasi Sekolah	Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P
(1)	(8)	(9)	(10)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0,82	0,41	0,62
2. Masih sekolah	90,12	91,44	90,77
3. Tidak bersekolah lagi	9,06	8,15	8,61
4. Jumlah 1 dan 3	9,88	8,56	9,23

Catatan:

L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

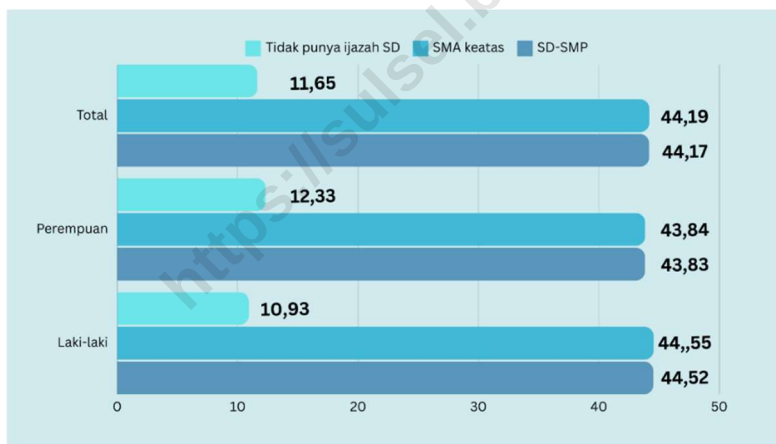
Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang mencakup pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu termasuk Program KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah turut melakukan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah salah satunya dengan menerapkan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selanjutnya, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, pemerintah melakukan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan turut perlu ditingkatkan. (Rancangan Teknokratik RPJMN 2022-2024).

5.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan sumber daya manusia.

Gambar 4 menunjukkan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan. Pada 2023, sebagian besar (44,17 persen) penduduk Sulawesi Selatan usia 15 tahun ke atas telah menamatkan jenjang pendidikan dasar, yakni SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Meskipun demikian, masih ada 11,65 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah pada 2023. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan kondisi 2022.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat

Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2023 Jika ditinjau dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan dasar tidak terlalu timpang. Namun demikian, persentase penduduk laki- laki yang berhasil menamatkan pendidikan menengah dan tinggi masih lebih tinggi dibandingkan

penduduk perempuan. Selanjutnya, persentase penduduk perempuan yang belum memiliki ijazah pun masih lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki, yakni sebanyak 12,33 persen. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi. Anak perempuan yang putus sekolah rentan mengalami perkawinan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Harapannya, pada 2025 kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk pendidikan.

K

6

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

<https://sulsel.bps.go.id>

6.1 Jumlah Sekolah

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. **Tabel 10** menyajikan jumlah sekolah menurut status sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2022/2023. Terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang SD sebanyak 6.445 sekolah, jenjang SMP sebanyak 1.734 sekolah, setingkat SMA sebanyak 619 sekolah, jenjang SMK sebanyak 432 sekolah, dan SLB sebanyak 94 sekolah.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggara pendidikan jenjang SMK di Sulawesi Selatan didominasi oleh pihak swasta dibanding negeri/pemerintah. Persentase SMK negeri dan SMK swasta pun cukup jauh perbedaannya, yakni 38,89 persen berbanding 61,2 persen. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK), persentase jumlah sekolah setingkat SMA dan setingkat SMK tidak terlalu berbeda jauh, yakni 58,90 persen (619 sekolah) berbanding 41,10 persen (432 sekolah). Jumlah sekolah setingkat SMK yang cukup bersaing dengan SMA diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan sebagai sarana tercipta sumber daya manusia yang siap bekerja secara profesional di bidangnya. Harapannya terjadi kemajuan maksimal antara laju pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Tabel 10 Jumlah Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Status Sekolah, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	139	3	142	49	8	57	9	2	11
02. Bulukumba	348	2	350	63	6	69	19	2	21
03. Bantaeng	147	3	150	25	18	43	6	2	8
04. Jeneponto	285	4	289	64	12	76	14	10	24
05. Takalar	234	6	240	39	9	48	13	12	25
06. Gowa	399	21	420	83	40	123	22	30	52
07. Sinjai	239	6	245	40	4	44	14	4	18
08. Maros	223	23	246	43	36	79	14	20	34
09. Pangkep	300	6	306	78	16	94	24	10	34
10. Barru	197	2	199	35	5	40	6	2	8
11. Bone	665	11	676	114	13	127	30	8	38
12. Soppeng	250	4	254	31	7	38	8	4	12
13. Wajo	375	13	388	70	4	74	15	5	20
14. Sidrap	229	9	238	44	7	51	11	5	16
15. Pinrang	306	13	319	52	5	57	11	5	16
16. Enrekang	219	5	224	40	6	46	12	6	18
17. Luwu	263	15	278	80	26	106	19	6	25
18. Tana Toraja	210	10	220	63	19	82	13	5	18
22. Luwu Utara	241	5	246	73	3	76	19	0	19
25. Luwu Timur	158	16	174	36	15	51	13	8	21
26. Toraja Utara	184	8	192	65	12	77	11	6	17
71. Makassar	314	160	474	56	170	226	24	116	140
72. Parepare	80	14	94	13	12	25	5	5	10
73. Palopo	65	16	81	14	11	25	6	8	14
Sulawesi Selatan	6.070	375	6.445	1.270	464	1.734	338	281	619

Lanjutan Tabel 10

Kabupaten/Kota (1)	SMK			SLB		
	N (11)	S (12)	J (13)	N (14)	S (15)	J (16)
01. Kep. Selayar	8	0	8	1	0	1
02. Bulukumba	11	6	17	1	1	2
03. Bantaeng	5	7	12	1	1	2
04. Jeneponto	10	11	21	2	2	4
05. Takalar	7	2	9	2	7	9
06. Gowa	5	17	22	1	5	6
07. Sinjai	4	6	10	1	1	2
08. Maros	2	16	18	1	3	4
09. Pangkep	9	5	14	1	1	2
10. Barru	5	3	8	1	0	1
11. Bone	9	15	24	1	8	9
12. Soppeng	5	5	10	1	6	7
13. Wajo	9	5	14	1	1	2
14. Sidrap	8	4	12	1	0	1
15. Pinrang	10	7	17	1	0	1
16. Enrekang	6	4	10	1	0	1
17. Luwu	13	13	26	0	3	3
18. Tana Toraja	4	23	27	1	3	4
22. Luwu Utara	8	7	15	0	3	3
25. Luwu Timur	2	2	4	0	3	3
26. Toraja Utara	5	17	22	0	1	1
71. Makassar	13	70	83	2	20	22
72. Parepare	3	9	12	1	1	2
73. Palopo	7	10	17	1	1	2
Sulawesi Selatan	168	264	432	23	71	94

Catatan:

N = Negeri

S = Swasta

J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

6.2 Jumlah Guru

Tabel 11 menyajikan jumlah pendidik/guru menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2022/2023. Jumlah guru sebanding dengan jumlah sekolah. Tingginya jumlah sekolah memengaruhi jumlah tenaga pendidik di dalamnya. Jumlah guru SD terbanyak berada di Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Gowa sesuai dengan jumlah sekolah jenjang SD yang dimiliki. Namun demikian, Kabupaten Bone memiliki jumlah SD terbanyak tetapi jumlah gurunya masih jauh di bawah Kota Makassar, yakni 5.160 orang dibanding 7.567 orang. Selanjutnya, jumlah guru SMP di Sulawesi Selatan sebanyak 28.429 orang. Kota Makassar memiliki jumlah guru SMP tertinggi, yakni sebanyak 3.729 orang.

Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sebanyak 15.495 guru SMA dan 9.859 guru SMK. Wilayah yang memiliki jumlah guru sekolah jenjang menengah terbanyak adalah Kota Makassar dengan 2.497 guru SMA/MA dan 1.553 guru SMK. Hal tersebut sebanding dengan jumlah sekolah jenjang menengah di Kota Makassar.

Jika dilihat menurut jenis kelamin untuk semua status sekolah, jumlah guru perempuan selalu lebih tinggi dibanding jumlah guru laki-laki. Guru SD perempuan di Sulawesi Selatan jumlahnya mencapai tiga kali lipat jumlah guru SD laki-laki, yakni 49.735 orang dibanding 14.412 orang. Selanjutnya, jenjang pendidikan dengan selisih guru perempuan dan laki-laki terendah adalah jenjang SMK. Terdapat 62,86 persen guru SMK perempuan (6.197 orang) dan 37,14 persen guru SMK laki-laki (3.662 orang).

Tabel 11 Jumlah Guru menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

Kabupaten/Kota (1)	Total (2)	SD			SMP		
		L (3)	P (4)	J (5)	L (6)	P (7)	J (8)
Kota Makassar	13.272	1.694	5.873	7.567	1.136	2.593	3.729
Kab. Bone	8.820	1.028	4.132	5.160	564	1.342	1.906
Kab. Gowa	7.001	909	3.368	4.277	565	1.291	1.856
Kab. Bulukumba	2.460	708	2.293	3.001	357	833	1.190
Kab. Wajo	5.349	654	1.966	2.620	442	1.034	1.476
Kab. Jeneponto	5.404	611	2.323	2.934	375	853	1.228
Kab. Pangkajene Kepulauan	5.268	426	2.214	2.640	367	967	1.334
Kab. Luwu	5.059	767	2.119	2.886	360	798	1.158
Kab. Pinrang	4.722	609	2.186	2.795	298	676	974
Kab. Maros	4.485	622	1.883	2.505	372	899	1.271
Kab. Sinjai	3.462	476	1.818	2.294	281	746	1.027
Kab. Takalar	4.548	522	1.833	2.355	305	665	970
Kab. Tana Toraja	4.065	655	1.683	2.338	348	611	959
Kab. Sidenreng Rappang	3.921	522	1.616	2.138	394	776	117
Kab. Luwu Utara	3.136	544	1.727	2.271	265	563	828
Kab. Enrekang	4.133	500	1.604	2.140	421	906	1.327
Kab. Barru	3.665	450	1.634	2.084	295	597	892
Kab. Toraja Utara	3.778	427	1.674	2.101	326	611	937
Kab. Soppeng	3.649	513	1.727	2.240	201	512	713
Kab. Luwu Timur	3.382	502	1.519	2.021	221	511	732
Kab. Kepulauan Selayar	3.064	430	1.380	1.810	217	499	716
Kab. Bantaeng	3.139	446	1.313	1.759	254	653	907
Kota Palopo	2.578	175	948	1.123	164	443	607
Kota Parepare	2.220	222	866	1.088	161	361	522
Sulawesi Selatan	93.336	14.412	49.735	64.147	8.689	1974	28.429

Lanjutan Tabel 11

Kabupaten/Kota	SMA			SMK			SLB		
	L	P	J	L	P	J	L	P	J
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kota Makassar	895	1.602	2.497	591	962	1.553	83	238	321
Kab. Bone	407	823	1.23	165	325	490	17	60	77
Kab. Gowa	359	728	1.087	222	362	584	21	57	78
Kab. Bulukumba	255	470	725	145	250	395	8	48	56
Kab. Wajo	247	440	687	134	272	406	11	26	37
Kab. Jeneponto	163	317	480	207	348	555	4	9	13
Kab. Pangkajene	216	548	764	160	356	516	1	27	28
Kab. Luwu	190	374	564	150	263	413	14	37	51
Kab. Pinrang	180	327	507	112	163	275	6	20	26
Kab. Maros	220	428	648	126	234	360	4	12	16
Kab. Sinjai	192	475	667	121	210	331	19	59	78
Kab. Takalar	256	469	725	104	176	280	10	21	31
Kab. Tana Toraja	185	333	518	102	175	277	3	8	11
Kab. Sidenreng	170	371	541	198	272	470	6	23	29
Kab. Luwu Utara	177	353	530	62	143	205	9	25	34
Kab. Enrekang	167	300	467	226	258	484	0	8	8
Kab. Barru	165	253	418	130	202	332	4	13	17
Kab. Toraja	206	398	604	42	69	111	1	14	15
Kab. Soppeng	106	198	304	116	230	346	14	50	64
Kab. Luwu Timur	110	159	269	83	201	284	3	19	22
Kab. Kepulauan Selayar	101	158	259	83	149	232	3	20	23
Kab. Bantaeng	100	205	305	84	158	242	2	13	15
Kota Palopo	149	282	431	172	234	406	5	27	32
Kota Parepare	101	167	268	127	185	312	6	14	20
Sulawesi Selatan	5.317	10.178	15.495	3.662	6.197	9.859	254	848	1.102

Catatan:

L = Laki-Laki

P = Perempuan

J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

6.3 Jumlah Murid

Tabel 12 menyajikan jumlah murid/siswa menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2022/2023. Secara total, terdapat 1.256.174 murid yang bersekolah di jenjang SD sampai SMK (termasuk SLB) di Sulawesi Selatan pada tahun ajaran 2022/2023. Jika dibandingkan, 58,45 persen dari total murid merupakan murid laki-laki dan 58,45 persen sisanya merupakan murid perempuan. Selisih persentase di antara keduanya dapat terbilang rendah, yakni sekitar 2,16 persen. Namun demikian, jika dilihat secara jumlah, selisih di antara keduanya sebanyak 33.791 murid. Artinya, murid laki-laki lebih banyak 33.791 orang dibanding murid perempuan. Kabupaten/kota yang memiliki murid bersekolah di jenjang SD sampai SMK (termasuk SLB) tertinggi adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone. Hal tersebut sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di 3 kabupaten/kota tersebut (jumlahnya terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan).

Pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), jumlah murid laki lebih banyak dibanding murid perempuan. Hal tersebut berkebalikan dengan komposisi murid pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK). Jumlah murid laki-laki yang duduk di bangku sekolah menengah sebanyak 175.029 orang. Sedangkan terdapat 177.299 murid perempuan yang duduk di bangku sekolah menengah. Jika dirinci lebih dalam, baik jumlah murid laki-laki maupun jumlah murid perempuan yang duduk di bangku SMA lebih banyak daripada yang duduk di bangku SMK. Selanjutnya, murid perempuan di SMA lebih tinggi jika dibandingkan dengan murid laki-laki, yakni sebesar 126.478 orang dan 102.377 orang. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih berminat untuk sekolah di jenjang SMK daripada penduduk perempuan.

Tabel 12 Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

Laki-laki

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Makassar	69.528	29.734	1.884	12.545	818	114.509
Kab. Bone	39.012	14.373	7.572	4.852	235	66.044
Kab. Gowa	35.025	10.566	8.486	288	204	54.569
Kab. Bulukumba	21.602	6.095	4.803	1.427	76	34.003
Kab. Wajo	22.807	7.851	4.831	1.775	92	37.356
Kab. Jeneponto	21.023	6.398	325	3.436	24	31.206
Kab. Pangkajene Kepulauan	18.534	7.479	3.522	2.838	97	32.470
Kab. Luwu	19.062	6.936	5.012	3.548	60	34.618
Kab. Pinrang	20.284	6.227	3.583	1.967	87	32.148
Kab. Maros	16.583	6.305	4.262	2.229	148	29.527
Kab. Sinjai	18.141	4.929	3.393	1.463	94	28.020
Kab. Takalar	1.652	6.211	4.894	1.016	49	13.822
Kab. Tana Toraja	15.072	7.733	2.405	5.311	19	30.540
Kab. Sidenreng Rappang	13.852	7.053	2.349	5.057	80	28.391
Kab. Luwu Utara	15.567	5.267	383	2.252	67	23.536
Kab. Enrekang	15.895	4.967	239	1.627	29	22.757
Kab. Barru	1.243	4.544	3.326	794	72	9.979
Kab. Toraja	10.006	3.084	1.531	1.256	57	15.934
Kab. Soppeng	11.339	4.225	3.205	1.744	23	20.536
Kab. Luwu	8.546	3.521	1.614	1.474	45	15.200
Kab. Kepulauan Selayar	9.132	3.918	2.543	2.777	108	18.478
Kab. Bantaeng	9.504	3.319	1.826	1.882	130	16.661
Kota Palopo	8.104	31	1.611	2.014	71	11.831
Kota Parepare	6.726	2.823	1.635	942	35	12.161
Sulawesi Selatan	428.239	163.589	75.234	64.514	2.720	734.296

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Tabel 12 Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

Kabupaten/Kota	Perempuan					
	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Makassar	65.509	29.168	2.117	10.761	500	108.055
Kab. Bone	36.264	13.966	8.789	3.964	158	63.141
Kab. Gowa	32.976	10.867	10.027	2.118	108	56.096
Kab. Bulukumba	19.871	6.457	5.985	1.039	62	33.414
Kab. Wajo	20.605	7.783	5.683	1.144	48	35.263
Kab. Jeneponto	19.363	6.732	4.475	2.742	18	33.330
Kab. Pangkajene Kepulauan	17.459	7.283	462	2.063	47	27.314
Kab. Luwu	17.558	6.408	5.978	2.072	62	32.078
Kab. Pinrang	19.118	6.137	4.188	2.046	52	31.541
Kab. Maros	15.578	6.183	5.137	1.645	96	28.639
Kab. Sinjai	17.086	5.198	4.317	1.051	53	27.705
Kab. Takalar	15.147	6.016	5.574	650	37	27.424
Kab. Tana	13.508	7.068	4.945	2.548	23	28.092
Kab. Sidenreng Rappang	12.279	6.306	4.789	1.739	52	25.165
Kab. Luwu Utara	14.559	5.051	4.828	1.359	45	25.842
Kab. Enrekang	15.032	5.068	3.419	1.305	30	24.854
Kab. Barru	11.375	4.211	3.735	822	34	20.177
Kab. Toraja	9.381	3.378	2.054	1.295	21	16.129
Kab. Soppeng	10.476	366	4.132	877	18	15.869
Kab. Luwu	817	3.343	2.143	1.077	16	7.396
Kab. Kepulauan Selayar	8.736	3.988	3.745	1.358	57	17.884
Kab. Bantaeng	9.079	333	2.523	1.264	82	13.281
Kota Palopo	7.676	3.082	2.335	1.367	38	14.498
Kota Parepare	612	2.889	1.852	973	14	6.340
Sulawesi Selatan	410.064	157.281	103.232	47.279	1.67	719.527

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Tabel 12 Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

Laki-Laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Makassar	135.037	58.902	4.001	23.306	1.318	222.564
Kab. Bone	75.276	28.339	16.361	8.816	393	129.185
Kab. Gowa	68.001	21.433	18.513	2.406	312	110.665
Kab. Bulukumba	41.473	12.552	10.788	2.466	138	67.417
Kab. Wajo	43.412	15.634	10.514	2.919	140	72.619
Kab. Jeneponto	40.386	13.130	4.800	6.178	42	64.536
Kab. Pangkajene Kepulauan	35.993	14.762	3.984	4.901	144	59.784
Kab. Luwu	36.620	13.344	10.990	5.620	122	66.696
Kab. Pinrang	39.402	12.364	7.771	4.013	139	63.689
Kab. Maros	32.161	12.488	9.399	3.874	244	58.166
Kab. Sinjai	35.227	10.127	7.710	2.514	147	55.725
Kab. Takalar	16.799	12.227	10.468	1.666	86	41.246
Kab. Tana Toraja	28.580	14.801	7.350	7.859	42	58.632
Kab. Sidenreng Rappang	26.131	13.359	7.138	6.796	132	53.556
Kab. Luwu Utara	30.126	10.318	5.211	3.611	112	49.378
Kab. Enrekang	30.927	10.035	3.658	2.932	59	47.611
Kab. Barru	12.618	8.755	7.061	1.616	106	30.156
Kab. Toraja Utara	19.387	6.462	3.585	2.551	78	32.063
Kab. Soppeng	21.815	4.591	7.337	2.621	41	36.405
Kab. Luwu Timur	9.363	6.864	3.757	2.551	61	22.596
Kab. Kepulauan Selayar	17.868	7.906	6.288	4.135	165	36.362
Kab. Bantaeng	18.583	3.652	4.349	3.146	212	29.942
Kota Palopo	15.780	3.113	3.946	3.381	109	26.329
Kota Parepare	7.338	5.712	3.487	1.915	49	18.501
Sulawesi Selatan	838.303	320.870	178.466	111.793	4.391	1.453.823

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

6.4. Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar Dan Guru

Jumlah rombongan belajar (rombel) dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh setiap guru pada satuan pendidikan tersebut. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan bahwa pada jenjang SD, satu rombel layaknya mencakup 15-20 peserta didik (murid). Sementara itu, pada jenjang SMP setidaknya terdiri dari 20-30 murid dalam satu rombel. Selanjutnya, jenjang SMA mencakup 20-30 murid dalam satu rombel dan sebanyak 15-25 murid yang dicakup dalam satu rombel untuk jenjang SMK.

Tabel 13 Jumlah dan Rasio Murid dan Rombongan Belajar menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Murid per Rombel
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	877.219	46.832	18,73
SMP	33.023	12.658	26,09
SMA	227.156	7.472	30,40
SMK	114.385	5.047	22,66

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan dalam **Tabel 13**, terlihat bahwa sebagian besar jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tersebut. Jenjang pendidikan tersebut adalah SMP, SMA, dan SMK. Namun demikian, rasio murid per rombel untuk jenjang SD masih di bawah ketentuan yang ada.

Harapannya, murid SD akan semakin bertambah mengingat ketersediaan rombongan belajar setingkat SD di Sulawesi Selatan cukup banyak.

Kualitas dan distribusi guru yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka tersebut menggambarkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio tersebut di suatu sekolah, semakin berkurang efektivitas proses belajar mengajar. Hal tersebut terjadi karena pengawasan dan perhatian guru terhadap murid cenderung berkurang sehingga kualitas pengajaran akan semakin rendah.

Tabel 142 Jumlah dan Rasio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid per Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	877.219	64.147	13,68
SMP	33.023	28.429	11,60
SMA	227.156	15.495	14,66
SMK	114.385	9.859	11,60

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 (diolah)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid. Sedangkan, seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 15 murid. **Tabel 14** menyajikan data rasio murid-guru. Dari tabel tersebut terlihat rasio murid-guru jenjang SD sampai SMA di Sulawesi Selatan cukup jauh berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan. Hal serupa juga terjadi pada jenjang SMK meskipun selisih rasio murid-guru dengan nilai ideal yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.

Meskipun demikian, rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator penentu kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan.

Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru, yakni S1/DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik.

7

PENUTUP

<https://sulsel.bps.go.id>

Kesimpulan

Dari hasil kajian data Susenas 2023 sebelumnya dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (5-6 tahun) pada 2023 di Sulawesi Selatan baru mencapai 17,71 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kabupaten yang capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata- rata Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Provinsi Sulawesi Selatan, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.
3. Hingga tahun 2023 masih terdapat 6,17 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf/ tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana di Sulawesi Selatan. Jika dirinci menurut kelompok umur, masih terdapat 3,43 persen penduduk usia 25-29 tahun dan 0,13 persen penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf.
4. Di Sulawesi Selatan, terdapat 9,23 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah, persentase anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.
5. Pada 2023, masih terdapat 11,65 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah di Sulawesi Selatan. Persentase perempuan usia

15 tahun ke atas yang belum punya ijazah lebih tinggi dibanding laki-laki usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah.

6. Jumlah guru di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2022/2023 didominasi oleh perempuan. Jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sebanding dengan jumlah sekolah pada jenjang tersebut
7. Pada Tahun Ajaran 2022/2023 di Sulawesi Selatan, jumlah murid perempuan yang duduk di bangku SMA/MA lebih tinggi dibandingkan jumlah murid laki-laki pada jenjang yang sama.
8. Jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2022/2023 sudah memenuhi persyaratan rombongan belajar yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Namun demikian, rasio murid per rombongan belajar untuk jenjang SD masih di bawah ketentuan yang ada.
9. Rasio murid-guru di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2022/2023 masih berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17.

8

DAFTAR PUSTAKA

<https://sulsel.bps.go.id>

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2002. Buku 4 Konsep dan Definisi – Sosial Survei Ekonomi Nasional 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2002. Buku 5 Pemanfaatan Data Susenas KOR dan KP – Sosial Survei Ekonomi Nasional 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<https://sulsel.bps.go.id>

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Asimtotik Kompetensi
Hormat Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan,
Telp (0411) 854838 (Sentral), 872879, Faks (0411) 851225,
Email : pst7300@bps.go.id , Website : <http://sulsel.bps.go.id>